

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- _____, 2009, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta.
- _____, 2019, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja*, Jakarta.
- Agustina, Rosa, 2003, *Perbuatan Melawan Hukum*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Agustina, Rosa, *et.al.*, 2012, *Hukum Perikatan (Law of Obligations)*, Pustaka Larasan, Denpasar.
- Akib, Muhammad, 2022, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ali, Zainuddin, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Badruzaman, Mariam Darus, 2023, *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan*, Deepublish Digital, Yogyakarta.
- D., Mukti Fajar N., dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Diantha, I Made Pasek, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Djojodirdjo, M. A. Moegni, 1982, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Frandsberg, Ake, 2009, *Law and Philosophy Library 88: Concepts In Law*, Springer, Netherlands.
- Fuady, Munir, 2017, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Garner (ed.), Bryan A., 1999, *Black's Law Dictionary Seventh Edition*, West Publishing Co., St. Paul Minn.
- Hamzah, Andi, 2016, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Alumni, Bandung.
- Harahap, Yahya, 2017, *Hukum Acara Perdata (tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Haryadi, Prim, 2022, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Gugatan Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Husin, Sukanda, 2020, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Ishaq, Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung.
- L. J. van Apeldoorn, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Lotulung, Paulus Effendi, 1993, *Penegakan Hukum Lingkungan oleh Hakim Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Machmud, Syahrul, 2012, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Mertokusumo, Soedikno, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Soedikno, 2005, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Soedikno, 2007, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Pitlo, A., 1979, *Het Nederlands Burgerlijk Wetboek (Deel 3, Algemene Deel van Het Verbintenissen Recht)*, Gounda Quint, Arnhem.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2018, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*, Mandar Maju, Bandung.
- Rahmadi, Takdir, 2015, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Rangkuti, Siti Sundari, 1996, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya.
- S., Salim H., dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, 2021, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1983, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Subardiah, Maissy, 2007, *Legal Standing Pemohon Dalam Pengujian Undang-Undang (Judicial Review) Pada Mahkamah Konstitusi*, Mappi FHUI, Jakarta.
- Subekti, R., 1989, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Bandung.
- Sudjana, Eggi dan Riyanto, 1999, *Penegakan Hukum Lingkungan dalam Perspektif Etika Bisnis di Indonesia*, Gramedia, Jakarta.

Sugono, Dendy, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.

Syarifah, Nur, *et.al.*, 2020, *Laporan Kajian Putusan Perkara Lingkungan Hidup: Enhancement of Human Rights and Environmental Protection in Training and Policy in the Judicial Process in Indonesia*, Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), Jakarta.

Wibisana, Andri G., 2017, *Penegakan Hukum Lingkungan melalui Pertanggungjawaban Perdata*, Badan Penerbit FHUI, Jakarta.

Widyastuti, Sari Murti, 2020, *Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Burgerlijk Wetboek voor Indonesie Staatsblad 1946 No. 67.

Herzien Inlandsch Reglement Staatsblad 1941 No. 44.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

Reglement op de Rechtsvordering Staatsblad Tahun 1847 No. 52.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

ARTIKEL JURNAL

- Aminah, Aminah, “Gugatan Perdata Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Indonesia,” *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 7, No. 2, Oktober 2019.
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, “Asas Ne Bis In Idem Dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Kajian Putusan Nomor 65/PDT.G/2013/PN-RAP,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, No. 1, April 2018.
- Erwinsyahbana, T., dan R. Ramlan, “Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Hukum Dalam Perspektif Filsafat Konstruktivis,” *Borneo Law Review*, Vol. 1, No. 1, 2017.
- Firmansyah, M., dan Diah Setyorini Gunawan, “Antara Pembangunan Ekonomi dan Degradasi Lingkungan,” *Jurnal Eko-Regional*, Vol. 2, No. 2, September 2007.
- Gunawan, Bambang Indra, “Urgensi Kedudukan Hukum (Legal Standing) dalam Pengujian Undang-Undang oleh Warga Negara Asing di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,” *Jurnal Lex Justitia*, Vol. 1, No. 1, Januari 2019.
- Helmi, “Kedudukan UU Cipta Kerja Terhadap UU-PPLH dan Implikasinya,” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 2, Agustus 2021.
- Helmi, Fitria, dan Retno Kusniati, “Penggunaan Omnibus Law dalam Reformasi Regulasi Bidang Lingkungan Hidup di Indonesia,” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 50, No. 1, Januari 2021.
- Irvansyah, Andika Risqi, “Kedudukan Hukum Keputusan Fiktif Positif Sejak Pengundangan Undang-Undang Cipta Kerja,” *Jurnal APHTN-HAN*, Vol. 1, No. 2, Juli 2022.
- Rizal, Moch. Choirul, *et.al.*, “Setahun Lembaga Studi Hukum Pidana (LSHP): Peningkatan Kapasitas Masyarakat Melalui Media Publikasi Berbasis Partisipasi,” *Jurnal Dedikasi Hukum*, Vol. 1, No. 3, Desember 2021.
- Rozi, Fachrul, “Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup Ditinjau dari Sisi Perdata dan Pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” *Jurnal Yuridis Unaja*, Vol 1, No. 2.
- Stoljar, Samuel J., “The Logical Status of a Legal Principle,” *The University of Chicago Law Review*, Vol. 20, No. 2, Winter 1953.

INTERNET

- Abdul Aziz. “Masuk Radar Investasi.” investor.id.
<https://investor.id/editorial/321866/masuk-radar-investasi> (diakses 5 Maret 2023).

- Anisatul Umah. “Raksasa Migas Cabut, Investasi Migas RI Sudah Tak Menarik?” [cnbcindonesia.com.
https://www.cnbcindonesia.com/news/20211209141639-4-297977/raksasa-migas-cabut-investasi-migas-ri-sudah-tak-menarik](https://www.cnbcindonesia.com/news/20211209141639-4-297977/raksasa-migas-cabut-investasi-migas-ri-sudah-tak-menarik) (diakses 5 Maret).
- Fitria Chusna Farisa. “Jalan Panjang UU Cipta Kerja: Tuai Penolakan, Dinyatakan Inkonstitusional, Kini Presiden Terbitkan Perppu.” [nasional.kompas.com.
https://nasional.kompas.com/read/2022/12/30/17580431/jalan-panjang-uu-cipta-kerja-tuai-penolakan-dinyatakan-inkonstitusional-kini](https://nasional.kompas.com/read/2022/12/30/17580431/jalan-panjang-uu-cipta-kerja-tuai-penolakan-dinyatakan-inkonstitusional-kini) (diakses 7 Maret 2023).
- Haryo Limanseto. “Siapkan Berbagai Langkah dan Strategi, Pemerintah Optimis Jaga Ekonomi Nasional Diatas Pertumbuhan Global pada Tahun 2023.” [ekon.go.id.
https://ekon.go.id/publikasi/detail/4794/siapkan-berbagai-langkah-dan-strategi-pemerintah-optimis-jaga-ekonomi-nasional-diatas-pertumbuhan-global-pada-tahun-2023#:~:text=Pemerintah%20juga%20memproyeksikan%20pertumbuhan%20ekonomi,1%25%20dari%20berbagai%20lembaga%20internasional](https://ekon.go.id/publikasi/detail/4794/siapkan-berbagai-langkah-dan-strategi-pemerintah-optimis-jaga-ekonomi-nasional-diatas-pertumbuhan-global-pada-tahun-2023#:~:text=Pemerintah%20juga%20memproyeksikan%20pertumbuhan%20ekonomi,1%25%20dari%20berbagai%20lembaga%20internasional) (diakses 5 Maret 2023).
- Karno. “Dampak Pembangunan Terhadap Lingkungan.” [cakrawalaide.com.
https://cakrawalaide.com/dampak-pembangunan-terhadap-lingkungan/](https://cakrawalaide.com/dampak-pembangunan-terhadap-lingkungan/) (diakses 7 Maret 2023).
- Legal Information Institute Cornell Law School. “*Construction.*” [law.cornell.edu. https://www.law.cornell.edu/wex/construction](https://www.law.cornell.edu/wex/construction) (diakses 17 Juli 2023).
- Tirta Citradi. “Aturan di RI Ribet: Ini yang Bikin Investor Betah & Kabur!” [cnbcindonesia.com.
https://www.cnbcindonesia.com/news/20190926145243-4-102455/aturan-di-ri-ribet-ini-yang-bikin-investor-betah-kabur](https://www.cnbcindonesia.com/news/20190926145243-4-102455/aturan-di-ri-ribet-ini-yang-bikin-investor-betah-kabur) (diakses 5 Maret 2023).
- Yitno Suprpto, “Eksekusi Putusan Hukum Kasus Karhuta Perusahaan Lamban di Jambi, Dampaknya?” [mongabay.co.id.
https://www.mongabay.co.id/2023/03/04/eksekusi-putusan-hukum-kasus-karhuta-perusahaan-lamban-di-jambi-dampaknya/](https://www.mongabay.co.id/2023/03/04/eksekusi-putusan-hukum-kasus-karhuta-perusahaan-lamban-di-jambi-dampaknya/) (diakses 7 Maret 2023).

HASIL PENELITIAN

- Ambar Kartilantika, 2019, Penerapan Prinsip Strict Liability dalam Gugatan Ganti Rugi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Kasus Kebakaran Hutan dan/atau Lahan, Tesis, Magister

Hukum Litigasi Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas
Gadjah Mada, Yogyakarta.

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 12/Pdt.G/2012/PN.Mbo., perihal gugatan perdata perbuatan melawan hukum lingkungan hidup perkara Menteri Lingkungan Hidup melawan PT. Kallista Alam, 8 Januari 2014.

Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 50/Pdt/2014/PT.Bna., perihal upaya hukum banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 12/Pdt.G/2012/PN.Mbo., perihal gugatan perdata perbuatan melawan hukum lingkungan hidup perkara Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melawan PT. Kallista Alam, 11 Juni 2014.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 651/K/Pdt/2015., perihal upaya hukum kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 50/Pdt/2014/PT.Bna., perihal gugatan perdata perbuatan melawan hukum lingkungan hidup perkara Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melawan PT. Kallista Alam, 28 Agustus 2015.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1/PK/Pdt/2017., perihal upaya hukum peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 651/K/Pdt/2015., perihal gugatan perdata perbuatan melawan hukum lingkungan hidup perkara Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melawan PT. Kallista Alam, 18 April 2017.

Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 24/Pdt.G-LH/2015/PN.Plg., perihal gugatan perdata perbuatan melawan hukum lingkungan hidup perkara Menteri Lingkungan Hidup melawan PT. Bumi Mekar Hijau, 30 Desember 2015.

Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 51/Pdt/2016/PT.Plg., perihal upaya hukum banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 24/Pdt.G-LH/2015/PN.Plg., perihal gugatan perdata perbuatan melawan hukum lingkungan hidup perkara Menteri Lingkungan Hidup melawan PT. Bumi Mekar Hijau, 12 Agustus 2016.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 591/Pdt.G-LH/2015/PN.Jkt.Sel, perihal gugatan perbuatan melawan hukum lingkungan hidup perkara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melawan PT. Nasional Sago Prima, 11 Agustus 2016.

Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 540/Pdt/2017/PT.Dki, perihal upaya hukum banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 591/Pdt.G-LH/2015/PN.Jkt.Sel, perihal gugatan perbuatan melawan hukum

lingkungan hidup perkara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melawan PT. Nasional Sago Prima, 4 Desember 2017.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3067/K/Pdt/2018, perihal upaya hukum kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 540/Pdt/2017/PT.Dki, perihal gugatan perbuatan melawan hukum lingkungan hidup perkara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melawan PT. Nasional Sago Prima, 17 Desember 2018.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 808/PK/Pdt/2020, perihal upaya hukum peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 3067/K/Pdt/2018, perihal gugatan perbuatan melawan hukum lingkungan hidup perkara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melawan PT. Nasional Sago Prima, 19 November 2020.

Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 213/Pdt.G/LH/2018/PN.Plk, perihal gugatan perbuatan melawan hukum lingkungan hidup perkara Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melawan PT. Arjuna Utama Sawit, 23 Oktober 2019.

Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 73/Pdt.G-LH/2019/PT.Plk, perihal upaya hukum banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 213/Pdt.G/LH/2018/PN.Plk, perihal gugatan perbuatan melawan hukum lingkungan hidup perkara Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melawan PT. Arjuna Utama Sawit, 2 Januari 2020.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3220/K/Pdt/2020, perihal upaya hukum kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 73/Pdt.G-LH/2019/PT.Plk, perihal gugatan perbuatan melawan hukum lingkungan hidup perkara Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melawan PT. Arjuna Utama Sawit, 10 Desember 2020.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 720/PK/Pdt/2022, perihal upaya peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 3220/K/Pdt/2020, perihal perbuatan melawan hukum lingkungan hidup perkara Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melawan PT. Arjuna Utama Sawit, 28 Juli 2022.

Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 39/Pdt.G/LH/2020/PN.Pbu, perihal gugatan perbuatan melawan hukum lingkungan hidup perkara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melawan PT. Kumai Sentosa, 23 September 2021.

Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 102/Pdt.G-LH/2021/PT.Plk, perihal upaya hukum banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 39/Pdt.G/LH/2020/PN.Pbu, perihal gugatan perbuatan melawan hukum lingkungan hidup perkara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melawan PT. Kumai Sentosa, 26 November 2021.

Putusan Mahkamah Agung Nomor, perihal upaya hukum peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 102/Pdt.G-LH/2021/PT.Plk, perihal gugatan perbuatan melawan hukum lingkungan hidup perkara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melawan PT. Kumai Sentosa, 18 Juli 2023.

Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 44/Pdt.G/LH/2021/PN.Stg, perihal gugatan perbuatan melawan hukum lingkungan hidup perkara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melawan PT. Rafi Kamajaya Abadi, 8 Agustus 2022.

Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 83/Pdt/LH/2022/PT.Ptk, perihal upaya hukum banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 44/Pdt.G/LH/2021/PN.Stg, perihal gugatan perbuatan melawan hukum lingkungan hidup perkara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melawan PT. Rafi Kamajaya Abadi, 27 Oktober 2022.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1385 K/Pdt/2023, perihal upaya hukum kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 83/Pdt/LH/2022/PT.Ptk, perihal gugatan perbuatan melawan hukum lingkungan hidup perkara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melawan PT. Rafi Kamajaya Abadi, 3 Juli 2023.